



Anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera, termasuk dalam penetapan *ujrah*.

Apabila nasabah sudah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, maka akan dilakukan akad *hiwālah* dengan nasabah tersebut dan dilakukan proses pencairan pembiayaan dengan nasabah sesuai jumlah pembiayaan yang diharapkan oleh nasabah atau anggota BMT Mandiri Sejahtera yang dimana di dalamnya akan dimuat besaran biaya pembiayaan, jangka waktu pengembalian, kemampuan nasabah untuk mengembalikannya, serta *ujrah* yang akan diterima oleh BMT.

Penetapan *ujrah* pada pembiayaan *hiwālah* yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera sebesar 20% pada setiap tahunnya atau dalam 12 x angsuran, apabila ada yang mengajukan pembiayaan *hiwālah* dan ingin melunasinya atau diangsur dalam jangka waktu 2 tahun maka 20% dikalikan dengan 2 dan diangsur sebanyak 24 x angsuran.

Contoh, apabila ada nasabah A yang mengajukan pembiayaan *hiwālah* yang sebelumnya memiliki hutang di Bank CIMB lalu di *take over* di BMT Mandiri Sejahtera sebesar Rp 15.000.000,- yang akan dilunasi dalam jangka waktu selama 1 tahun atau 12 x angsuran. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, nasabah A harus membayar angsuran sebesar Rp 1.500.000,- dalam setiap bulannya selama 1 tahun atau 12 x angsuran.









1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijārah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qarḍ* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad *ijārah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa *ijārah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Poin yang ke empat sudah jelas dikatakan bahwa besar *ijārah* tidak boleh berdasarkan pada banyaknya jumlah pinjaman yang diberikan oleh LKS kepada nasabah, akan tetapi hal seperti masih diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi ini masih belum sempurna karena perhitungan *ujrah* masih berdasarkan pada besarnya pinjaman nasabah atau di sini disebut sebagai *muḥīl*.